

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
1.5.Tinjauan Pustaka	13
1.5.1. Angkutan Udara Niaga	13
1.5.2. Struktur Pasar Dalam Teori Ekonomi	14
1.5.3. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	15
1.5.4. Pendekatan Yuridis Dalam Persaingan Usaha	17
1.5.5. Pendekatan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha	18

1.5.6. Pengawasan KPPU Dalam Usaha Jasa Angkutan Udara Domestik	18
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.6.1. Tipe Penelitian	20
1.6.2. Pendekatan Masalah	20
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.6.5. Analisa bahan Hukum	23
1.7. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II

KARAKTERISTIK PENETAPAN HARGA DAN KARTEL DALAM INDUSTRI PERSAINGAN USAHA ANGKUTAN UDARA DOMESTIK	27
2.1. Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha	27
2.2. Pengaturan Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha	32
2.2.1. Konsep Dan Pengaturan Kartel	32
2.2.2. Kartel Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat	39
2.3. Pengaturan Perjanjian Penetapan Harga Dalam Hukum Persaingan Usaha	42
2.4. Relevansi Hubungan Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Dalam Hukum Persaingan Usahan.....	48
2.5. Karakteristik Persaingan Usaha Pada Industri Angkutan Udara Domestik Di Indonesia.....	50
2.6. Indikasi Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Angkutan Udara Domestik di Indonesia	56

2.6.1. Indikasi Dugaan Praktek Kartel	57
2.6.2. Indikasi Dugaan Penetapan Harga	64

BAB III

UPAYA HUKUM KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKU USAHA ANGKUTAN UDARA DOMESTIK YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....	66
---	----

3.1. Pengawasan Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	66
3.1.1. Kedudukan KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	66
3.1.2. Tugas dan Kewenangan KPPU di Indonesia	70
3.1.3 Penanganan Perkara KPPU di Indonesia	74
3.2. Definisi Pasar Bersangkutan Dalam Industri Persaingan Usaha Angkutan Udara Domestik	80
3.3. Hambatan Masuk Sebagai Suatu Masalah Dalam Industri Angkutan Udara Domestik	85
3.3.1. Pengertian Hambatan Masuk (<i>Barriers to Entry</i>).....	85
3.3.2. Permasalahan dan akibat dari Hambatan Masuk (<i>Barriers to Entry</i>).....	87
3.4. Pembuktian Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Industri Angkutan Udara Domestik	93
3.4.1. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> dalam Hukum Persaingan Usaha.....	93
3.4.2. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha	

Tidak Sehat	99
3.4.3. Analisis Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Industri Angkutan Udara Domestik.....	102
3.5. Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Persaingan Usaha Angkutan Udara Domestik	110
BAB IV	
PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan	117
4.2. Saran	118
DAFTAR BACAAN	